



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT  
NOMOR : W.33-02.HA.05.03 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENGUMPULAN DATA DAN PENDAMPINGAN KAB/KOTA  
PEDULI HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Proses Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 2023, perlu membentuk panitia kegiatan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusiadi Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021 – 2025;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi;dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENGUMPULAN DATA DAN PENDAMPINGAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023;

- KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut : (Terlampir);
- KEDUA : Panitia Kegiatan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
- a. Melakukan persiapan Pengumpulan data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM;
  - b. Melaksanakan Pengumpulan data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM;
  - c. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten/Kota Peduli HAM; dan
  - d. Melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Program Pemajuan HAM Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.09.2.667798/2023 tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya tugas Panitia Penyelenggara, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.



Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 01 Februari 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PARLINDUNGAN

NIP 197007011992031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN  
PANITIA KEGIATAN FASILITASI PROSES  
PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK  
ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : W.33-02.HA .05.03 TAHUN 2023  
TANGGAL : 01 Februari 2023

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI PROSES PENILAIAN  
KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pembina : PARLINDUNGAN  
(Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat)
2. Pengarah : RAHENDRO JATI  
(Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Barat)
3. Ketua : IDRIS  
(Kepala Bidang HAM)
4. Sekretaris : ANDI FAHRIZAL JASIN  
(Kepala Sub. Bidang Pemajuan HAM)
5. Anggota :
  1. MITRA BANGSAWAN MUKHTAR  
(JFU Bidang Hak Asasi Manusia)
  2. TRI REZKI DERMAWAN  
(JFU Bidang Hak Asasi Manusia)
  3. SITTI IRA  
(JFU Bidang Hak Asasi Manusia)
  4. A. FEBRI PAJRIANY  
(JFU Bidang Hak Asasi Manusia)



Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 01 Februari 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PARLINDUNGAN  
NIP 197007011992031002